

Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri 3 Tarutung

Author:

Erpinna Sipahutar¹
Melfayenti Tanjung²
Hotlinar Gultom³
Lamtiurma Sormin⁴
Elvis Tulus Sihite⁵
Pardomuan
Simanullang⁶

Afiliation:

Institut Agama Kristen
Negeri Tarutung^{1,2,3,4,5,6}

Corresponding email

erpinnasipahutar@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2023-04-10
Accepted: 2023-04-14
Published: 2023-04-15



This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License

Abstrak:

Institusi pendidikan akan dapat berjalan dengan baik jika memiliki sistem manajemen yang baik pula. Adanya sumber daya manusia (SDM), pembiayaan dan sarana prasarana yang memadai akan mempermudah dalam menjalankan manajemen dalam suatu institusi atau dalam satuan pendidikan. Penelitian ini mengetahui Implementasi Manajemen Pembiayaan di SMA Negeri 3 Tarutung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mengambil kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha, dan 1 orang guru sebagai sampel penelitian. Mengamati permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 3 Tarutung, yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Serta mengadakan wawancara/tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh di SMA Negeri 3 Tarutung menunjukkan bahwa Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diperoleh dari 1 Tata Usaha dan 1 orang guru melalui pertanyaan yang diajukan. Perencanaan pada sekolah SMA Negeri 3 Tarutung sudah berjalan dengan baik. Mulai dari tahap kepala sekolah memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas, menghargai pendapat bawahan, dan melibatkan tenaga pendidik dan kependidikan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).

Kata kunci: Implementasi; Manajemen Pembiayaan; Pendidikan

Pendahuluan

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Tujuan pendidikan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dapat dicapai dengan adanya biaya pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk mencapai tujuan Nasional Negara Indonesia.

Dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 pada pasal 31 ayat 1 s/d 3 menyatakan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; serta (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya pendidikan sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan nasional, maka wajib bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan bangsa Indonesia.

Akdon, dkk., (2017:9) Biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain besar kecilnya sebuah institusi, jumlah siswa, tingkat gaji guru atau dosen yang disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, rasio siswa berbanding guru dan dosen, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduk

(khususnya negara berkembang), perubahan kebijakan dari penggajian atau pendapatan (*revenue theory of cost*).

Pernyataan di atas jelas menggambarkan bahwa biaya pendidikan bukan sesuatu yang mudah untuk menjalankannya, hal itu perlu adanya manajemen yang baik dari berbagai pihak yang bersangkutan, baik dari pemerintah, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Efektivitas dan efisiensi dalam biaya pendidikan akan berdampak positif khususnya dengan situasi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial sebagai dampak dari hasil pendidikan. Pada tingkat mikro, individu yang berpendidikan cenderung lebih baik, memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan kesehatannya baik.

Di Indonesia, peran pemerintah dalam membantu pembiayaan pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 amandemen ke 4 menyatakan bahwa, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Pemerintah memegang peran penting dalam hal ini, demi tercipta situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu: pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa, Ferdi W.P (2013:566).

Yang dimaksud dengan diskriminatif pada amanat Undang-undang di atas adalah mengenai pembiayaan atau dana dalam pendidikan, sikap diskriminatif tidak diharapkan pada penyelenggaraan pendidikan, karena setiap warga negara memiliki hak mendapat pendidikan yang dibutuhkan sehingga tujuan pendidikan menjadikan warga negara yang beradab dan berakhlak dapat tercapai.

Dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas, pendidikan mempunyai standar acuan pendidikan yang diharapkan. Acuan ini dijadikan standart dalam sebuah lembaga pendidikan agar tujuan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai. Di antara standar yang menjadi acuan ialah:

1. *Standar kompetensi lulusan*, standar kompetensi lulusan berfungsi sebagai pedoman sebagai penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Proses penilaian dalam menentukan kelulusan dalam hal kognitif, afektif, psikomotorik.
2. *Standar isi kurikulum*, standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapaikompetensi pada lulusan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kurikulum berdasarkan proses pendidikan terkait dengan independensi materi yang disajikan guru kepada peserta didik. Isikurikulumberhubungan dengan relevansi, kondisiinterdisiplin dan karakteristik pengetahuan dan pengalaman belajar yangterkait dengan apa yang dipelajari peserta didik.
3. *Standar proses*, ialah proses pembelajaran yang diajarkan pada satuan pendidikan. Artinya segala kegiatan yang berlangsung didalam kelas, biasa disebut dalam kegiatan belajar mengajar . baik dalam pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran.hal semua itu harus disusun serapi mungkin, agar kegiatan proses belajar mengajar yang berlangsung didalam kelas dapat berjalan dengan baik.
4. *Standar pendidik dan tenaga kependidikan*, seorang pendidik yang terdapat disuatu instansi pendidikan harus mempunyai kompetensi yang baik. Pengembangan kompetensi bisa berupa pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah ataupun dari pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar pendidik dan tenaga pendidik berkopetensi dalam bidangnya, mudah mengalami segala problematika yang dihadapi dalam pekerjaan diruang lingkup lembaga pendidikan.

5. *Standar sarana dan prasarana*, karakteristik institusi pendidikan yang berkualitas ialah dengan memiliki sarana dan prasarana yang baik. Mencakup ruang belajar, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dalam keadaan baik. Artinya semua berfungsi seutuhnya.
6. *Standar pengelolaan pendidikan*, standar pengelolaan ialah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. *Standar pembiayaan pendidikan*, pembiayaan pendidikan memiliki tiga hal (a) biaya pendidikan (b) biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan (c) biaya pribadi peserta didik.
8. *Standar penilaian pendidikan*, penilaian hasil belajar oleh pendidik penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Pemerintah memiliki delapan standar untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, salah satunya yaitu melalui standart pembiayaan pendidikan. Dalam pencapaian tujuan pendidikan standar pembiayaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting, yang masuk dalam kategori standar pendidikan pemerintah.

Dapat dikatakan tanpa adanya biaya kegiatan yang dilakukan tidak akan berjalan maksimal. Terlebih pada proses pendidikan disekolah. Biaya yang berasal dari pemerintahan pusat, daerah, ataupun orangtua harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Artinya segala biaya yang ada harus dipergunakan secara tepat, sesuai tingkat kebutuhan dalam mewujudkan proses pendidikan yang bermutu sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam setiap jenjang pendidikan. Pendidikan tanpa didukung dengan biaya yang memadai, maka proses pendidikan disekolah tidak akan berjalan sesuai harapan. Pendidikan yang diharapkan hanya sebuah impian jika tidak didukung dengan biaya yang memadai.

Studi Literatur

Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep kebijakan inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Implementasi pembiayaan pendidikan dalam kaitannya meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung (*direct cost*) biaya pengeluaran secara tidak langsung yang menunjang proses pendidikan yang dalam hal ini berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Menurut Husnan dan Enny, manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut sebagai manajer keuangan. Meskipun demikian, kegiatan keuangan tidak terbatas dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan seperti direktur keuangan, manajer keuangan dan lain-lain.

Menurut Weston dan Brigham, manajemen keuangan ialah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pencarian dana dengan biaya yang serendah-rendahnya dan menggunakannya secara efektif dan efisien untuk kegiatan operasi organisasi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kekayaan organisasi, khususnya organisasi perusahaan atau organisasi bisnis.

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sistem yang sentral dalam pendidikan, pembiayaan bagian dari pendukung penyelenggaraan pendidikan karena menyangkut tentang pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang terkecil sampai kepada pembiayaan operasional yang besar. Penggunaan pembiayaan yang mendukung pada peningkatan mutu pendidikan yang tepat sasaran dengan

memenuhi sistem tata kelola manajemen keuangan lembaga pendidikan harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah. Analisis efisiensi keuangan sekolah dalam pemanfaatan sumber-sumber sekolah dari hasil (*out put*) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisis biaya satuan (*unit cost*) persiswa. Biaya satuan persiswa adalah biaya satuan rata-rata persiswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada disekolah dalam waktu tertentu.

Menurut pendekatan manajemen, pembiayaan pendidikan merupakan pondasi dasar dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu standar pendidikan yang dibuat oleh pemerintah, sebagai syarat mencapai pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan memiliki komponen dalam kaitannya yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya rutin sekolah. Pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kajian manajemen pendidikan. Akan tetapi pembiayaan pendidikan mempunyai kajian tersendiri dalam kaitannya, dan mempunyai fungsi dalam prosesnya. Fungsi pembiayaan pendidikan yaitu bagaimana memperoleh biaya dan mempergunakan biaya tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Tarutung yang terletak di JL. S. M. Simanjuntak, Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Peneliti ini dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini adalah penelitian yang akan mengungkapkan informasi mengenai implementasi manajemen pembiayaan di SMA Negeri 3 Tarutung. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi merupakan hasil pertimbangan bahwa dengan jenis dan pendekatan penelitian ini dapat membantu untuk mendapatkan informasi dan atau data yang diperlukan peneliti untuk mendeskripsikan kejadian sosial yang lebih spesifik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Tata Usaha, Komite Sekolah, dan Bendahara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Catatan lapangan dikumpulkan dan di analisis dengan cermat dan lugas, kemudian menyisihkan data lapangan yang tidak sesuai dengan fokus penelitian data dan pembahasan penelitian. Setelah data disajikan dalam rangkaian analisis data, maka data tersebut ditampilkan untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

Hasil

Temuan Umum dan Temuan Khusus

Sekolah menengah atas SMA Negeri 3 Tarutung adalah salah satu lembaga pendidikan yang memiliki daya saing yang baik dengan sekolah-sekolah favorit di provinsi Sumatera Utara, hal ini dapat kita lihat dari tingkat kelulusan siswa di perguruan tinggi negeri maupun sekolah ikatan dinas dari tahun ke tahun. SMA Negeri 3 Tarutung juga termasuk salah satu sekolah yang berstandar nasional.

Latar belakang berdirinya SMA Negeri 3 ini karena beliau menginginkan adanya sekolah unggul di kabupaten yang dipimpinnya yakni Tapanuli Utara. Penerimaan siswa baru kala itu harus melalui sistem seleksi, begitu juga dengan guru-guru yang mengajar di sekolah ini semua harus mengikuti proses seleksi yang ketat. Lulusan SMA Negeri 3 Tarutung pada tahun ajaran 2015/2016 yakni lulusan pertama 100 persen masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama di Indonesia melalui jalur SBMPTN (Seleksi

Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Bahkan, ada siswa masuk Akademi Kepolisian dan empat orang masuk IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

SMA Negeri 3 Tarutung telah memiliki izin operasional dari departemen pendidikan nasional dengan akreditasi “A” sesuai dengan sertifikat 740/BAP-SM/LL/XI/2016. Kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 3 Tarutung sampai sekarang adalah kurikulum 2013. Struktur organisasi di SMA Negeri 3 Tarutung adalah struktur organisasi yang berbentuk lini fungsional. Struktur organisasi yang berbentuk lini fungsional ini dapat dikenali dengan karakteristik pembagian tugas dan tanggung jawab kerja berdasarkan fungsi masing-masing bagian serta adanya koordinasi antar bagian. Struktur lini merupakan struktur dimana di dalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan.

SMA Negeri 3 Tarutung berlokasi di JL. SM. Simanjuntak, Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Dapat dilihat tenaga pendidik dan kependidikan yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Tarutung sebanyak 26 orang dan jumlah siswa di SMA Negeri 3 Tarutung adalah sebanyak 396 orang.

Pendidikan yang bermutu dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki disekolah. Sarana dan prasarana sangat mendukung dalam ketercapaian tujuan pendidikan yang diharapkan. Minimnya sarana yang ada dapat menghambat segala tujuan yang telah direncanakan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan maka perlu adanya peningkatan dalam hal sarana dan prasarana yang memadai.

Pembahasan

Perencanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 3 Tarutung. Dalam kegiatan manajemen, perencanaan berarti keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan merupakan langkah pertama dalam proses menyusun anggaran belanja sekolah bagi orang yang mengetahui semua unsur organisasi. Keberhasilan perencanaan sangat menunjang keberhasilan kegiatan manajemen secara keseluruhan.

Secara sederhana *planning* (perencanaan) berarti merencanakan segala sesuatunya terlebih dahulu, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas. Menurut Kamal Muhammad Is dalam Husnul Yaqin, perencanaan adalah suatu pemikiran yang mantap terhadap suatu pekerjaan yang akan dilakukan, agar bentuk dan tahapan pelaksanaannya dapat berjalan menurut garis yang telah ditentukan dengan jelas, baik sasaran maupun caranya.

Sejalan dengan teori di atas, sekolah SMA Negeri 3 Tarutung melalui tim RKAS dan kepala sekolah membuat rancangan anggaran tahunan yang memuat jumlah pemasukan dan pengeluaran atau belanja selama setahun. Draf yang dibuat tersebut dibawa dalam rapat, seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah yaitu Bapak Drs. Dalles Tambun dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dibuat terlebih dahulu oleh kepala sekolah dan bendahara dengan memperkirakan dana yang akan diterima dari dana BOS. Setelah itu dimusyawarahkan dengan tim RAPS. Hal ini memudahkan nantinya pada saat rapat sudah ada acuan, tinggal menerima saran dan masukan dari pihak guru dan komite sekolah. Dengan demikian semua pihak merasa dilibatkan dan bertanggung jawab terhadap rencana dan program”.

Pengorganisasian manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 3 Tarutung

Pengorganisasian merupakan langkah pertama kearah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya yang berkaitan untuk menggerakkan organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh. Bergeraknya organisasi tergantung kepada pengorganisasian seluruh komponen dalam organisasi untuk bergerak kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pengorganisasian seorang pemimpin seyogyanya

mengetahui dan memahami sifat pekerjaan dari masing masing personil yang akan diberikan jabatan pada organisasi. Kemampuan penempatan jabatan merupakan bagian dari pengorganisasian.

Dalam penelitian yang saya teliti pengorganisasian manajemen pembiayaan di sekolah tersebut sudah cukup memadai yang dimana sebelum adanya pelaksana terlebih dahulu mengorganisasikan apa saja yang harus disiapkan dalam memanager pembiayaan pendidikan tersebut agar tercapainya tujuan yang efektif dan efisien. Dengan begitu pengorganisasian yang telah disiapkan menjadi jauh lebih baik lagi.

Proses pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 3 Tarutung

Manajemen pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggung jawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Sesuai dengan pernyataan di atas peneliti menyimpulkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Dalles Tambun selaku Kepala Sekolah menyatakan: “Jadi pengelolaan pembiayaan yang terdapat dalam sekolah adalah pembiayaan dari pemerintah berupa dana BOS. Selain itu untuk menghasilkan dana yang efektif dan efisien sekolah juga memberlakukan dana SPP yang berasal dari orang tua peserta didik untuk pendanaan kegiatan ekstrakurikuler dengan begitu sekolah bisa meningkatkan kualitas sekolah. Berdasarkan kebutuhan sekolah pemerintah memberikan dana BOS terhadap sekolah yang dimana dana tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pengelolaan yang terdapat dalam sekolah tersebut cukup memadai yang dimana dana yang diberikan sudah jelas dan dapat direalisasikan dengan baik oleh pihak yang bersangkutan. Dengan begitu dengan adanya pengelolaan pembiayaan pendidikan yang tepat maka sekolah tersebut akan menentukan tingkat kemajuan dan keberhasilan pendidikan”.

Pengawasan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 3 Tarutung

Pengawasan yang dilakukan disekolah tersebut adalah dengan adanya laporan atau catatan yang telah disepakati bersama pihak sekola maka setiap adanya pengeluaran atau pemasukan dana tersebut maka pihak komite dan bendahara harus membuat laporan terlebih dahulu agar lebih efektif dan efisien tiap menjalankan tugas yang telah diberikan oleh atasan. Kegiatan yang perlu diawasi dalam hal pembiayaan sekolah yaitu pembukuan yang jelas. Baik dalam hal perolehan biaya sampai pada hal pengeluaran yang dilakukan untuk apa saja.

Berdasarkan pernyataan di atas, pengawasan ini dilakukan demi kesesuaian realisasi yang direncanakan, sehingga pengelolaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari dana BOS tepat sasaran dan bisa dipertanggung jawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Kegiatan pengawasan yang dilakukan memiliki jangka waktu yang ditentukan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri 3 Tarutung” dapat disimpulkan: 1) Perencanaan pada sekolah SMA Negeri 3 Tarutung sudah berjalan dengan baik. Mulai dari tahap kepala sekolah membentuk tim RKAS, memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas, menghargai pendapat bawahan, dan melibatkan tenaga pendidik dan kependidikan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). 2) Pengorganisasian di sekolah SMA Negeri 3 Tarutung sudah berjalan dengan baik dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler yang sudah diterapkan di sekolah tersebut sehingga sekolah tersebut bisa menjalankan program pengorganisasian dengan baik. Contohnya saja dalam ekstrakurikuler akademik, renang, kesamaptaan dan karate. Dengan begitu kegiatan ekstrakurikuler bisa menjadikan sekolah tersebut lebih baik kedepannya. 3) Pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan yang telah diterapkan dan disepakati bersama biaya pendidikan yang dikeluarkan dari sekolah tersebut adalah biaya yang bersumber dari dana BOS dan SPP. Dengan begitu kepala sekolah, bendahara dan tim RKAS bertanggung jawab atas pelaporan yang disajikan serta

pengalokasian anggaran pembelajaran kegiatan belajar mengajar. 4) Pengawasan pada SMA Negeri 3 Tarutung sudah berjalan dengan baik, dari kegiatan yang perlu diawasi dalam kegiatan pembiayaan, koordinasi antara pihak sekolah dan tim pengawas yang berkaitan.

Referensi

Akdon dkk, (2017), Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Akbar, R. (2009), Pembiayaan Pendidikan, <http://raisulakbar.wordpress.com>, diakses 1 Juli 2009.

Ahmadi, Rulam. (2014), Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-RuzzMedia.

Asnaini. Dkk, (2012), Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Teras.

Wijaya, Candra dan Rifa'i, Muhammad, (2016), Dasar Dasar Manajemen, Medan: Perdana Mulya Sarana.

Ferdi W.P, (2013), Pembiayaan Pendidikan Suatu Kajian Teoritis", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19 No. 4.

Hadijaya, Yusuf, (2012), Administrasi Pendidikan, Medan: Perdana Mulya Sarana